

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Diterjemahkan dari bahasa inggris grand theory adalah istilah yang diciptakan oleh sosiologi Amerika C. Wright Mills dalam the sociological imagination untuk merujuk pada bentuk teori yang sangat abstrak dimana organisasi formal dan pengaturan konsep diprioritaskan dari pada memahami realita sosial.

Grand teori adalah teori yang menjelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, maupun pengalaman manusia. Grand teori ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami dunia sosial.

1. Signaling Theory

Menurut Brigham (2011) *Signaling Theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang.

Signaling Theory (Teori sinyal) menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dari pihak – pihak berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang berkualitas.

Perusahaan mengakui pendapatan saat pendapatan tersebut telah direalisasikan pada saat atau telah diterima atau didapatkan. Akun terpenting dalam laporan keuangan yaitu pendapatan dikarenakan akun ini memberikan informasi dan menilai kinerja suatu perusahaan selain itu menjadi daya Tarik untuk para investor yang dijual ke publik dengan melewati saham yang dijual perusahaan. Pendapatan diakui dengan seharusnya saat pendapatan sangat besar maupun kecil akan menyebabkan data dalam laporan laba rugi untuk Pendapatan adalah salah satu akun utama pada laporan keuangan yang informasinya sangat bermanfaat bagi para penggunanya terkait laporan posisi keuangan dan penilaian kinerja suatu perusahaan (IASB, 2018).

Pendapatan merupakan patokan dalam melakukan perhitungan kinerja suatu perusahaan. Sedangkan, pengakuan terhadap pendapatan merupakan salah satu factor utama dalam penentuan pendapatan perusahaan, di mana

pendapatan perlu di lakukan pengakuan pada saat sesuai dan tepat supaya menunjukkan value yang sesungguhnya, dan tidak terjadi salah saji dalam pelaporan informasi keuangan dan pengambilan keputusan menjadi lebih akurat (Hidayat,2016).

Pada perusahaan telekomunikasi pengidentifikasian kewajiban pelaksanaan juga relative sulit di laksanakan pada proses awal pengimplementasian ketentuan atau standar baru karena perusahaan harus mengklasifikasikan seluruh pendapatan jasa yang di pasarkan secara bundled (produk gabungan). Proses selanjutnya menetapkan harga transaksi berdasarkan jumlah kewajiban yang di laksanakan dan penerimaan hak atas penyelesaian kewajiban tersebut dari pelanggan kepada perusahaan (Casnila & Nurfitriana, 2020).

Penelitian sebelumnya dampak-dampak penerapan PSAK 72 tersebut telah di lakukan, di antaranya dan Veronika et al (2019) yang menyatakan bahwa penerapan pengakuan pendapatan berbasis PSAK72 membuat kinerja keuangan suatu perusahaan real estate terlihat tidak terlalu baik jika di lakukan perbandingan dengan menggunakan standar sebelumnya.

Musadi (2017) menyatakan perbandingan antara pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya berikut bagaimana dampak terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan salah satunya dalam sector bisnis telekomunikasi. Sedangkan penelitian Casnila dan Nurfitriana (2020), yang menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya terdapat perbedaan dampak perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAk 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terlisting di Bursa pengambilan keputusan bagi pihak manajemen (Musadi, Karamoy, & Gamaliel,2017)

perusahaan telekomunikasi pengidentifikasian kewajiban pelaksanaan juga relative sulit di laksanakan pada proses awal pengimplementasian ketentuan atau standar baru karena perusahaan harus mengklasifikasikan seluruh pendapatan jasa yang di pasarkan secara bundled (produk gabungan). Proses selanjutnya menetapkan harga transaksi berdasarklanjumlah kewajiban yang di laksanakan dan penerimaan hak atas penyelesaian kewajiban tersebut dari pelanggan kepada perusahaan (Casnila & Nurfitriana, 2020)

2.2 Standar Akuntansi

Menurut Bahri (2019), akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupaserta sistemastis. Isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas, hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

Keluaran siklus atau proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi atau dikenal dengan pemakai informasi akuntansi.

Standar akuntansi memiliki peran layaknya *standard operating procedure* pada suatu perusahaan, yakni disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seseorang dalam melakukan pekerjaannya terutama bagi profesi akuntan perusahaan. Lebih jelasnya, Suwardjono (2011) menjelaskan standar akuntansi sebagai konsep, prinsip, teknik, dan hal lainnya yang sengaja dipilih oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan (pada umumnya negara) guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Meski kerap tidak sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan, penyusunan standard akuntansi tetap harus berdasar

pada kerangka konseptual.

Di Indonesia, terdapat empat standar akuntansi yang diterapkan oleh *standard setting body*, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikhususkan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Standar Akuntansi Keuangan terdiri atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

ISAK kerap kali diterbitkan untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang perlu dibahas lebih lanjut dari PSAK. Hingga pada saat ini, baik antara PSAK maupun ISAK terus direvisi secara berkesinambungan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Efektif per 1 Januari 2020, terdapat 43 PSAK dan 19 ISAK yang perlu diperhatikan oleh entitas-entitas publik dalam menyajikan laporan keuangan.

SAK yang berlaku efektif di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup panjang sebelum akhirnya mengadopsi secara penuh IFRS pada tahun 2012. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, untuk pertama kalinya standar akuntansi disahkan oleh IAI dengan nama Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Prinsip tersebut merupakan hasil penghimpunan bahan-bahan dan struktur dari *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), yakni standar akuntansi internasional yang berlaku di Amerika Serikat. Terhadap PAI tersebut, IAI telah melakukan revisi sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1984 dan 1994. Terakhir kali, yakni pada tahun 1994, PAI direvisi secara total dengan beralih untuk melakukan harmonisasi dengan *International Accounting Standards* (IAS) dan berganti istilah menjadi Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2008). Sejak saat itulah, Indonesia secara perlahan dan konsisten melakukan adaptasi terhadap IAS maupun IFRS, Terlebih pada tahun 2008, Indonesia tergabung dalam *The Group of Twenty*

(G-20) dan kemudian menyepakati untuk berkomitmen mengadopsi IFRS secara penuh.

Adopsi IFRS tersebut dilakukan Indonesia secara bertahap (*gradual strategy*), yakni tahap adopsi yang dimulai pada tahun 2008, tahap persiapan pada tahun 2011, dan memulai tahap implementasi pada tahun 2012. Hingga saat ini, IAI terus berusaha meminimalisir gap antara SAK dan IFRS dengan mengikuti setiap pembaharuan yang dilakukan oleh IASB sebagai penyusun IFRS. Pada setiap PSAK yang diterbitkan, IAI memberikan penjelasan secara lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur akuntansi dari yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK).

Berdasarkan KKPK (IAI 2018a) tersebut, disebutkan bahwa pada prosedur akuntansi pengakuan akan dibahas mengenai proses pembentukan pos yang bersangkutan pada laporan keuangan dengan menyatakannya dalam kata-kata maupun jumlah moneter. Selanjutnya, prosedur penetapan jumlah moneter yang dilaporkan dalam laporan keuangan dijelaskan pada bagian pengukuran, yakni menggunakan biaya historis, biaya kini, nilai terealisasi, ataupun nilai sekarang.

Prosedur akuntansi penyajian dan pengungkapan membahas terkait struktur, isi, dan persyaratan yang perlu disampaikan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan untuk kepentingan penyajian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, SAK memiliki peranan yang cukup penting dalam dunia akuntansi di Indonesia. Selain sebagai pedoman bagi penyusun laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliabel serta mempermudah pengguna dalam menginterpretasikannya (Bahri, 2016),

SAK yang telah mengadopsi IFRS juga dapat meningkatkan aspek *comparability* (keterbandingan) laporan keuangan perusahaan lokal terhadap perusahaan-perusahaan global. Hal ini tentu juga menjadi keuntungan bagi perusahaan lokal untuk dapat memasuki pasar modal global dan menarik investor-investor asing,

Selain kegunaan yang sudah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa manfaat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bisa diperoleh oleh masing-masing pihak. Manfaat tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

1. SAK bagi pemegang saham bisa membantu dalam pertumbuhan keuangan
2. Bagi investor atau penanam modal, SAK bermanfaat untuk mengetahui kondisi dan risiko suatu perusahaan. Hal ini menjadi rujukan apakah investor akan berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak.
3. SAK juga bermanfaat bagi kreditur dalam hal menilai kemampuan perusahaan membayar pinjaman dan pengembalian utang. SAK bagi pihak perbankan juga digunakan untuk memutuskan pemberian pinjaman
4. Bagi supplier, SAK bermanfaat dalam menilai kemampuan perusahaan membayar penjualan saat jatuh tempo. Hal ini lantaran, SAK memberikan gambaran pada supplier akan kredibilitas perusahaan untuk membayar pinjaman.
5. SAK juga tentunya bermanfaat bagi pemerintah. SAK berguna untuk menentukan data statistik pendapatan nasional dan kebijakan pajak.

2.2.1 Jenis-jenis standar akuntansi keuangan

Setiap negara memiliki jenis Standar Akuntansi Keuangan masing-masing. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat empat jenis SAK yang berlaku. Berikut adalah empat pilar menurut website IAI Global yang telah diterbitkan oleh DSAK IAI bersama DSAS IAI:

Gambar 2. 1 Jenis-jenis Standar Akuntansi Keuangan



Sumber:iaiglobal.or.id(<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/home>)

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian dari laporan keuangan. Standar ini juga digunakan untuk entitas perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yakni entitas yang sudah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sejak tahun 2015 mengadopsi *International Financing Reporting Standards* (IFRS). Pengadopsian ini perlu dilakukan karena Indonesia sendiri merupakan anggota Federasi Akuntansi Internasional (*International Federation of Accountants*) serta juga sudah menyepakati penggunaan standar tersebut dalam forum G20 London. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam standar IFRS yaitu tentang pentingnya interpretasi dan aplikasi untuk laporan keuangan. Diperlukan juga penilaian dan evaluasi akan laporan keuangan apakah sudah mencerminkan realitas ekonomi. Standar ini juga mengharuskan keberadaan profesional auditor untuk penilaian SAK.

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK- ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan untuk entitas (lembaga atau organisasi) yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Artinya, SAK-ETAP ini biasanya dipakai oleh perusahaan kecil sampai menengah yang membuat laporan keuangan hanya untuk tujuan umum atau pengguna eksternal, seperti untuk kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK-ETAP dibuat lebih sederhana dari PSAK-IFRS. Tujuannya adalah untuk menciptakan penerapan yang fleksibel serta memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan perbankan. Selain itu, sebagian besar siklus akuntansi SAK-ETAP menggunakan konsep biaya historis dan relatif tidak berubah dalam beberapa tahun

3. Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Di Indonesia juga berlaku Standar Akuntansi Syariah (SAS) atau sering juga disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-Syariah). Standar akuntansi keuangan ini ditujukan bagi entitas atau perusahaan yang memakai sistem transaksi syariah. Acuan bagi SAS sendiri adalah mengikuti SAK umum namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI.

4. Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Mengatur beberapa hal seperti kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istishna. Beberapa lembaga yang menggunakan SAS adalah seperti bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, dan koperasi syariah. Meskipun begitu, lembaga atau perusahaan lain yang non syariah juga bisa menggunakan standar ini karena acuannya juga tetap berlandaskan SAK umum. Standar Akuntansi Keuangan EMKM. Penyusunan standar ini

difungsikan untuk melengkapi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

2.3 Pendapatan

2.3.1 Pengertian Pendapatan

Lam dan Lau (2014:317) mengemukakan pengertian, Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan 9 dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1) mendefinisikan: Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi ingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan menurut Sodikin dan Riyono (2014:37), "Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti

penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa”.Martani, dkk (2016:204) definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut: Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fees), bunga (interest), dividen (dividend), dan royalti (royalty).

2.3.2 Karakteristik Pendapatan

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang kemudian menjadi penentu atau batasan bahwa sejumlah uang/kas yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan, serta sejumlah besar pendapatan dan proses penandingan.

1. Sumber Pendapatan

Nilai rupiah aktiva bertambah dengan berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan nilai rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan.

2. Produk dan Kegiatan Utama Perusahaan

Produk perusahaan biasanya berupa barang ataupun jasa. Perusahaan

tertentu bahkan dapat menghasilkan produk yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, misalnya perusahaan yang menghasilkan dua jenis produk ini sekaligus (barang dan jasa). Terkadang, produk yang dihasilkan secara kebetulan bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai bagian dari elemen pendapatan non operasional. Maka dalam hal ini, pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut atau seberapa sering produk tersebut dihasilkan. Sejumlah Besar Pendapatan dan Proses Penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan dikali kuantitas terjual.

Perusahaan tentu mengharapkan adanya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan yang lebih besar dari jumlah yang dibebankan. Laba atau rugi yang timbul baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban diperbandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak diperbandingkan dengan pendapatan, maka akan diketahui besarnya jumlah rupiah laba maupun rugi.

2.3.3 Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh oleh suatu organisasi dapat berasal dari beberapa sumber yang berbeda dan dengan jenis yang berbeda pula. Pada dasarnya pendapatan tersebut timbul dari kegiatan utama perusahaan, seperti dari hasil penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Dengan demikian, menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pendapatan dapat berasal dari:

- a) Hasil penjualan dari barang hasil produksi oleh perusahaan manufaktur maupun penjualan atas barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan dagang

- b) Penjualan atau penyerahan jasa, baik atas dasar kontrak maupun tidak.
- c) Penggunaan aktiva, baik aktiva berwujud maupun tidak berwujud oleh pihakpihak lain yang kemudian akan menghasilkan bunga, sewa, royalti, dan dividen.

Pendapatan diperoleh dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan mengembangkan perusahaan. Seluruh aspek kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut dengan earning process. Secara garis besar, earning process menimbulkan dua akibat, yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan, dan pengaruh negatif atau biaya dan kerugian. Selisih dari keduanya akan menghasilkan laba atau rugi. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang diperoleh dan yang akan diperoleh berhubungan erat dengan metode pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan yang diperoleh dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Operasional (Operating Revenue)

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima perusahaan yang bersumber dari hasil kegiatan utama perusahaan tersebut. Pendapatan operasional perusahaan dagang bersumber dari penjualan barang dagangan, pendapatan operasional perusahaan jasa bersumber dari penyerahan jasanya, dan pendapatan operasional perusahaan industri bersumber dari hasil penjualan barang yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri.

Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan yang terjadi berulang-ulang selama perusahaan beroperasi. Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan

operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan.

Adapun jenis-jenis pendapatan operasional, yaitu:

1. Penjualan (sales), yaitu hasil dari penjualan barang-barang yang menjadi objek usaha pokok perusahaan. Penjualan (sales) dapat dibedakan atas:
 - 1) Penjualan Bruto (gross sales), yaitu semua hasil penjualan, sebelum dikurangi dengan berbagai potongan atau pengurangan-pengurangan lainnya.
 - 2) Penjualan Bersih (net sales), yaitu hasil penjualan bersih yang telah diperhitungkan (dikurangkan) dengan berbagai potongan dan pengurangan-pengurangan lainnya.
- b. Potongan Pembelian Tunai (purchases discount), yaitu potongan yang diperoleh perusahaan karena telah melakukan pembelian barang-barang yang merupakan objek usaha pokok perusahaan lain dengan menggunakan metode pembayaran secara tunai.
- c. Penerimaan Tambahan dari Pembelian (purchases allowance), yaitu tambahan barang atau ekstra yang diterima dari pihak penjual, karena perusahaan dalam melakukan pembelian barang-barang menggunakan metode pembayaran tunai atau karena perusahaan melakukan pembelian barang-barang dalam jumlah/partai besar.

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu:

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
- 2) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
- 3) Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui Kerjasama dengan para investor.

2. Pendapatan Non operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non operasional juga di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Hasil sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.
- 2) Bunga, merupakan hasil yang di dapat setelah meminjamkan uang kepada pihaklain.

2.3.4 Kriteria Pengakuan Pendapatan

Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan jumlah dan saat di mana suatu pendapatan harus dimasukkan dan dilaporkan dalam suatu periode. Masalah ini penting karena bila salah dalam pelaksanaannya, maka penetapan laba menjadi tidak tepat. Masalah penetapan jumlah pendapatan secara langsung berhubungan dengan saat dimana penjualan barang atau penyerahan jasa diakui sebagai pendapatan dan nilai atau jumlah dari pendapatan yang akan diakui. Perbedaan yang terjadi pada saat pengakuan pendapatan dan penentuan jumlah pendapatan akan mempengaruhi jumlah dari pendapatan yang akan dilaporkan.

Pengakuan (recognition) adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, dimana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu defenisi dari unsur laporan keuangan. Item tersebut juga harus dapat diukur dalam satuan unit moneter (satuan mata uang) agar dapat diakui.

Pengakuan juga adalah proses pencatatan secara formal atau penyatuan secara formal suatu pos ke dalam rekening laporan keuangan. Dengan demikian, suatu elemen dapat diakui (dicatat) atau dapat tidak diakui (dicatat). Pengakuan merupakan proses penggabungan suatu item dalam neraca atau

laporan laba rugi yang:

- a) Memenuhi definisi elemen; dan
- b) Memenuhi kriteria pengakuan

Hal ini melibatkan penggambaran item dengan kata-kata dan jumlah moneter dan masuknya jumlah tersebut dalam total neraca atau laporan laba rugi. Item yang memenuhi kriteria pengakuan harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kegagalan dalam mengakui salah satu item tersebut tidak dapat diperbaiki oleh pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun oleh catatan atau materi penjelasan.

- a) Profitabilitas Manfaat Ekonomi di Masa Depan Kriteria pertama untuk pengakuan adalah profitabilitas aliran manfaat ekonomi masa depan.
- b) Keandalan Pengakuan Kriteria kedua untuk pengakuan item adalah apakah biaya atau nilai item tersebut dapat diukur dengan andal.

Untuk memastikan atau mengestimasi biaya atau nilai item, penggunaan estimasi yang masuk akal merupakan bagian penting dari penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan. Jika nilai biaya dan item tidak dapat diukur atau diperkirakan secara andal, maka item tersebut tidak akan diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.

Ada beberapa kriteria dari pengakuan pendapatan menurut Winwin, yaitu:

- 1) Definisi (definitions), artinya item-item tersebut harus memenuhi unsur-unsur laporan keuangan.
- 2) Keterukuran (measureability), artinya item-item tersebut harus mempunyai atribut yang relevan dengan tingkat keandalan yang tinggi atau untuk menentukan keandalan daya ujinya.
- 3) Relevan (relevance), artinya informasinya harus mendukung dan memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan.
- 4) Dapat Diandalkan (reliability), artinya informasinya menyajikan keadaan

yang sebenarnya, wajar, jujur, berdaya uji, dan netral.

2.3.5 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam penentuan laba suatu perusahaan. Oleh sebab itu, metode pengakuan pendapatan yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh suatu laporan laba rugi yang andal dan dapat dipercaya. Berdasarkan prinsip konservatisme, pendapatan seharusnya diakui apabila ada kepastian bahwa perusahaan akan memperoleh penghasilan.

Dengan kata lain, pendapatan dapat diakui segera setelah perusahaan telah melakukan apa yang disepakati dalam suatu transaksi dengan nilai atau jumlah dari suatu transaksi telah diakui secara pasti. Pengakuan pendapatan juga merupakan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu entitas atau perusahaan. Dalam hal ini, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu tentang penentuan pengakuan pendapatan dan penentuan nilai atau jumlahnya. Pengakuan pendapatan berarti adanya penerimaan nilai baru ke dalam aktiva suatu perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang terjadi.

Pengakuan pendapatan menggambarkan aliran kas masuk aktual atau yang diharapkan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dari suatu aktivitas utama entitas. Dengan demikian, pengakuan pendapatan berkaitan dengan kapan suatu pendapatan dapat diakui atau dicatatkan pada buku entitas. Dalam praktiknya, pengakuan pendapatan ditandai dengan pencatatan pendapatan dalam proses akuntansi. Secara konvensional, pencatatan tersebut dicatatkan ke dalam jurnal.

Pendekatan transaksi membutuhkan definisi yang jelas kapan unsur penghasilan seharusnya diakui atau dicatat dalam laporan keuangan. Di bawah prinsip-prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dari akumulasi, pendapatan tidakhanya terjadi atau diakui ketika kas sudah diterima. Kerangka konseptual mengidentifikasi dua faktor yang seharusnya dipertimbangkan di dalam memutuskan kapan pendapatan seharusnya diakui.

Pendapatan (revenue) pada umumnya diakui ketika:

- 1) Pendapatan telah direalisasikan atau dapat direalisasikan, dan
- 2) Pendapatan dihasilkan oleh aktivitas yang telah mengalami penyelesaian substansial selama proses perolehan pendapatan.

Kedua kriteria ini biasanya dipenuhi pada titik penjualan (point of sale), yang sering kali terjadi ketika barang diantar atau ketika pelayanan telah diberikan kepada pelanggan. Biasanya, aktiva dan pendapatan diakui bersamaan. Dengan demikian, penjualan persediaan menghasilkan peningkatan kas atau piutang dagang yang sekaligus menimbulkan peningkatan dalam pendapatan penjualan. Akan tetapi, kadang-kadang kas diterima sebelum kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi. Sebagai contoh, jika seorang klien membayar dimuka, maka kas dicatatkan ke dalam jurnal walaupun pendapatan belum dapat diakui. Dalam kasus-kasus seperti ini, hutang yang timbul dari pendapatan diterima dimuka baru dapat diakui ketika kriteria pengakuan pendapatan telah sepenuhnya dipenuhi, dimana pada saat hal itu terjadi, pendapatan diakui seiring dengan berkurangnya hutang yang timbul karena adanya pendapatan diterima dimuka. Secara umum, pendapatan tidak diakui sebelum titik penjualan terjadi karena:

1. Janji pembayaran yang sah dari pelanggan belum diterima, atau
2. Perusahaan belum menyerahkan produk atau jasanya. Dengan bahasa sederhana, pendapatan diakui ketika perusahaan yang menghasilkan atau yang akan menerima pendapatan telah memberikan sejumlah barang atau menyediakan jasa yang telah dijanjikan (penyelesaian substansial) untuk pelanggan, dan ketika pelanggan memberikan bayaran atau setidaknya janji pembayaran yang sah (dapat direalisasikan) oleh perusahaan. Agar pendapatan terealisasi, persediaan atau aktiva lain harus ditukar dengan kas

atau diminta dalam bentuk kas.

3. Kriteria proses laba pada dasarnya berhubungan dengan pengakuan pendapatan. *Revenues* dan *income* secara umum dapat terjadi pada berbagai tahapan siklus operasional, yaitu pada saat diterimanya pesanan, pada saat proses produksi, pada saat penjualan, atau pada saat penerimaan. Untuk memperoleh pendapatan, cara dan proses terjadinya adalah berbeda untuk setiap perusahaan. Hal ini disebabkan karena jenis dan luas kegiatan perusahaan yang berbeda pula, sehingga mengakibatkan lamanya proses pendistribusian hasil produk, baik berupa barang maupun jasa. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas.

Selain itu, industri tertentu juga mempunyai pedoman yang sangat spesifik yang kemudian memberikan pandangan tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*) menetapkan bahwa pendapatan dapat diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan.

Ada empat jenis transaksi pendapatan dan saat pengakuannya sesuai dengan prinsip di atas, yaitu:

1. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk-produk, diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa, diakui ketika jasa-jasa tersebut telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva milik perusahaan, pendapatan ini dapat berupa pendapatan bunga, sewa, maupun royalti, yang kemudian diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketiga aktiva itu digunakan.

4. Perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain dari produk, yang akan diakui pada tanggal penjualan.

Menurut Belkoui, pendapatan diakui atas dasar:

1. Dasar Akrual (Accrual Basis)

Pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi (dalam kasus dimana laba dapat dihitung secara proporsional terhadap pekerjaan yang diselesaikan atau jasa yang dilakukan), pada akhir produksi, pada saat penjualan produk, atau pada saat penagihan penjualan.

Pendapatan secara umum diakui selama produksi dalam situasi-situasi berikut ini:

- a. Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap pelanggan.
- b. Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa profesional atas jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.
- c. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau “persentase penyelesaian” (percentage of completion). Persentase penyelesaian dihitung sebagai:
 1. Estimasi teknik dari pekerjaan yang dilakukan sampai tanggal tersebut dibandingkan dengan total pekerjaan yang akan diselesaikan dalam hal kontrak; atau
 2. Total biaya yang terjadi sampai tanggal tersebut dibandingkan dengan total biaya yang diestimasi untuk total proyek di dalam kontrak tersebut.

e. Pendapatan atas “kontrak biaya plus pembiayaan tetap” (cost plus fixed-fee contract) lebih baik diakui menggunakan basis akrual.

f. Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapat (misalnya, ketika minuman atau anggur semakin bertambah umurnya, pohon semakin bertumbuh, atau hewan peliharaan semakin besar). Meskipun suatu transaksi harus terjadi sebelum pendapatan diakui dalam contoh-contoh ini, pertumbuhan pendapatan didasarkan pada penilaian persediaan komparatif.

2. Dasar Kejadian Penting (Critical Event Basis)

Pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi. Kejadian tersebut dapat berupa: waktu penjualan; penyelesaian produksi; atau penerimaan pembayaran setelah penjualan.

Ada beberapa metode pengakuan pendapatan dalam perusahaan yang secara umum dipraktikkan, yaitu:

1) Pendapatan diakui pada saat penjualan

Bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, saat penjualan merupakan saat yang paling umum digunakan sebagai titik waktu pengakuan pendapatan. Dapat juga dikatakan bahwa pendapatan diakui pada saat realisasi karena realisasi ditandai dengan telah terjadinya transaksi pertukaran produk atau jasa perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, misalnya yang terjadi pada saat terjadinya piutang dagang.

2) Pendapatan diakui pada saat produksi selesai

Pengakuan pendapatan pada saat kegiatan produksi telah selesai dimungkinkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harga jual produk yang dihasilkan dapat ditentukan secara tepat.
- Tidak diperlukannya kegiatan dan biaya pemasaran yang berarti untuk memasarkan produk tersebut.
- Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan.
- Satuan-satuan persediaan dapat ditukar.

Jika keempat syarat tersebut diatas terpenuhi, maka tidak ada masalah untuk mengakui pendapatan pada saat produk telah selesai diproduksi.

- 3) Pendapatan diakui secara proporsional dengan penyelesaian produksi Proses pengakuan pendapatan secara proporsional dengan proses produksi mengharuskan adanya penaksiran persentase.

Penaksiran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- Pendekatan berdasarkan persentase beban Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan beban yang telah dibebankan dengan taksiran total beban untuk menyelesaikan produk yang bersangkutan.
 - Pendekatan berdasarkan penyelesaian fisik Persentase penyelesaian fisik didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh ahlinya, dimana sebagian akuntan atau manajemen dapat meminta bantuan dari pihak lain seperti insinyur atau arsitek (dalam proyek konstruksi) untuk menaksir penyelesaian pekerjaan.
- 4) Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam rantai kegiatan sebelumnya dianggap realisasi pendapatan belum sampai pada tahapan yang substansial. Misalnya saja masih terdapat ketidakpastian yang besar mengenai kolektabilitas piutang. Karena ketidakpastian yang besar tersebut maka biasanya pengakuan pendapatan ditunda sampai pada saat kas diterima.

Pada prinsipnya, ada dua cara pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

1. Dasar Tunai (cash basis)

Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana kas diterima atau dibayar. Sederhananya, metode kas merupakan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan apabila kas telah diterima.

2. Dasar Akrua (accrual basis)

Pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan (earned). Metode ini merupakan metode yang paling mendasar. Sehingga, sepanjang ketentuan- ketentuan dasar tersebut telah terpenuhi, maka suatu pendapatan sudah boleh diakui.

2.4 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK 23

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 terdiri dari paragraf 36 – 44.

1. Paragraf 36, Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:
 - a. penjualan barang
 - b. penjualan jasa menghasilkan bunga royalti dan dividen
2. Paragraf 37 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

3. Paragraf 38 Pejualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- (a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- (b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- (c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- (d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.

(e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

4. Paragraf 39 penjualan jasa

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
- c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
- d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

5. Paragraf 40

Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

6. Paragraf 41 Bunga, Royalti dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui atas dasar yang diatur dalam paragraf 41 bila:

- a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; dan
- b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

7. Paragraf 42 Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut
- a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
 - b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
 - c) dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
8. Paragraf 43 Pengungkapan Perusahaan harus mengungkapkan:
- a) kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
 - b) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari:
 - (1) penjualan barang
 - (2) penjualan jasa
 - (3) bunga
 - (4) royalti
 - (5) dividen
 - c) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.
 - d) pendapatan yang ditunda pengakuannya.
9. Paragraf 44 Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan.

2.5 PSAK 72

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mempublish PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, di mana akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan jika perusahaan melakukan penerapan secara dini maka diperbolehkan. PSAK 72 merupakan standar utama yang menjadi pedoman peraturan terkait pengakuan

pendapatan yang akan menjadi pengganti dari seluruh standar yang mengatur pengakuan pendapatan sebelumnya, antara lain ISAK 10 terkait program loyalitas pelanggan, PSAK 23 terkait pendapatan, PSAK 44 terkait Akuntansi Aktivitas pengembangan Real Estat, ISAK 21 terkait perjanjian konstruksi Real Estat, dan ISAK27 terkait pengalihan asset dari pelanggan, dan PSAK 34 terkait kontrak Konstruksi (Veronica et al,2018).

Sejak PSAK 72 berlaku, pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan hanya bisa diakui bila barang dan jasa sudah diserahkan. Perubahan system pencatatan yang diatur PSAK 72, jelas berpengaruh terhadap hasil akhir operasional perusahaan – pendapatan berbasis kontrak. perubahan sistem pencatatan yang diatur PSAK 72, jelas berpengaruh terhadap hasil akhir operasional perusahaan—pendapatan berbasis kontrak. Penerapan PSAK ini sejatinya memberikan dampak positif, semua perusahaan memiliki basis yang sama, mencatat dan mengakui pendapatan dari kontrak. Dan membuat pencatatan keuangan lebih transparan (Rahayu, 2020).

PSAK 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan (revenue) dalam PSAK 72 diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas.

Penelitian dilakukan di Malta oleh Karl (2016). Penelitian tersebut mengevaluasi perubahan dalam perusahaan konstruksi lokal sebagai akibat dari pelaksanaan IFRS 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi di Malta harus mengevaluasi dampak dari IFRS 15, memperoleh pemahaman yang

mendalam tentang prinsip-prinsip yang baru, dan melakukan konsultasi teknis kepada akuntan yang mengerti IFRS.

Haggen müller (2019) yang mengulas masalah dan tantangan utama selama implementasi IFRS 15 dan menilai dampak yang mungkin ditimbulkan pada profitabilitas dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri tertentu mengalami kesulitan dalam menerapkan persyaratan pengakuan pendapatan karena panduan yang tidak spesifik sehingga memaksa mereka untuk menggunakan standar di luar IFRS 15. IFRS 15 juga memengaruhi perusahaan dengan model bisnis sederhana karena implementasinya memakan waktu dan biaya.

1. Implementasi PSAK 72

Bagaimana pengaturan PSAK72, mengidentifikasi kontrak, kewajiban, menentukan harga transaksi, alokasi harga ke setiap PO, dan pengakuan pendapatannya. Untuk mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, suatu kontrak bisa tertulis atau lisan. Kontrak itu ada bila bisa dipaksakan, para pihak telah menyetujui dan berkomitmen melaksanakan kewajiban, hak setiap pihak atas barang atau jasa yang akan dialihkan dan imbalan dapat diidentifikasi, memiliki substansi komersial, dan kemungkinan besar entitas bisa menagih imbalan.

Bila kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi persyaratan di atas, dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan sebagai pendapatan jika; entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk dan seluruh imbalan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan atau Kontrak telah berakhir dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan.

Untuk kombinasi kontrak, entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang

sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal; jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal (NURFITRIANA, 2020).

Modifikasi kontrak, entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct) dan harga kontrak meningkat oleh jumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu

Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat pada kontrak. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik. Dimana suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan (distinct). Atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.

Barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan (distinct). Yaitu barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan (yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan).

Dan dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak (yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut) (Veronica, Lestari, & Metekohy, 2019).

2. Ukuran dalam PSAK 72

Berdasarkan PSAK 72, yang mensyaratkan atau mewajibkan entitas perusahaan untuk melaksanakan analisa transaksi sesuai kontrak terlebih dahulu yang terdiri dari 5 tahapan untuk menetapkan pengakuan pendapatan, yakni:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.72 mengenalkan *Five Steps Model* (model 5 langkah) dalam melakukan pengakuan pendapatan. langkah tersebut adalah :

- a. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak
- c. Mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- d. Menentukan Harga Transaksi
- e. Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, menurut PSAK 72 (2016:72 Par.09), pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut

Gambar 2. 2 Five Steps Model Berdasarkan PSAK 72 Sumber: ifrs.org



1. Mengidentifikasi Kontrak Dengan Pelanggan

Suatu entitas dapat mengakui kontrak dengan pelanggan jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Semua pihak sepakat atas suatu kontrak dan memegang komitmen masing-masing untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut.
- b. Suatu entitas dapat melakukan identifikasi hak atas barang atau jasa yang akan dialihkan.
- c. Suatu entitas dapat melakukan identifikasi atas jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan.
- d. Suatu kontrak memiliki substansi komersial dalam hal risiko yang mungkin terjadi, waktu pelaksanaan kontrak atau perkiraan jumlah arus kas di masa yang akan datang.
- e. Suatu entitas dapat menagih imbalan yang berhak diterimanya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

2. Modifikasi Kontrak

Modifikasi kontrak menjelaskan tentang perubahan kontrak yang mungkin terjadi dilakukan meliputi ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. Ruang lingkup kontrak mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (*distinct*).
- b. Harga kontrak mengalami peningkatan jika terjadi penyesuaian harga jual dari barang atau jasa yang semula disepakati dan harga jual tersebut berdiri sendiri yang mencerminkan harga pada suatu kontrak tertentu.

3. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Pada bagian ini suatu entitas menilai barang atau jasa yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan dan mengakui suatu kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:

- a. Suatu barang atau jasa yang ada dalam kontrak dapat diidentifikasi dan dapat dibedakan.
- b. Barang atau jasa yang dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan

3. Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Pada bagian ini entitas mengakui adanya pendapatan jika entitas tersebut telah melaksanakan kewajibannya baik berupa pengiriman barang atau penyelesaian jasa kepada pelanggan. Suatu aset dialihkan kepada pelanggan ketika aset tersebut sudah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu atau *Performance Obligation Over Time* dimana suatu entitas mengalihkan asetnya setelah kewajibannya kepada pelanggan terpenuhi.
- b. Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu atau

c. *Performance Obligationa at a Point In Time* menjelaskan jika suatu entitas tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka entitas tersebut harus melaksanakan kewajiban yang sama pada periode waktu tertentu yang disepakati lebih lanjut dengan mempertimbangkan persyaratan pengendalian atas kewajiban suatu entitas tersebut mencakup:

- 1) Entitas memiliki hak kini atas pembayaran asset.
- 2) Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas asset.
- 3) Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas asset.
- 4) Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan asset.
5. Pelanggan telah menerima asset.

Pengukuran Kemajuan Terhadap Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan Secara Penuh untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu penyelesaian dari kewajiban pelaksanaan entitas).

Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu.

2.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Kinerja keuangan perusahaan memberikan informasi mengenai keberhasilan yang telah dicapai perusahaan, juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta membantu pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga berguna untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan dapat dinilai salah satunya dengan cara melakukan analisis rasio keuangan yang dihitung berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan arus kas). Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan (Casnila & Nurfitriana, 2020).

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang dilaksanakan entitas perusahaan dan dapat dilihat dalam laporan keuangan (Kurniasari, 2014). Kinerja keuangan merupakan analisis yang difungsikan untuk melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan berdasarkan ketentuan yang ada. Kinerja keuangan berdasarkan penelitian dilakukan pengukuran melalui CR (Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), dan NPM (Net Profit Margin). CR (Current Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan pelunasan pada liabilitas lancar dengan tepat waktu. DER (Debt to Equity Ratio) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan penilaian melalui perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas

perusahaan. NPM (Net Profit Ratio) adalah indikator yang di fungsikan untuk melakukan pengukuran laba setelah interest (Bunga) dan tax (pajak) yang didapatkan disandingkan dengan total penjualannya (Kasmir, 2015).

1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada hakekatnya mempunyai banyak tujuan, seperti di ungkapkan oleh Munawir 2014 yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profibilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, adalah melakukan usahanya dengan stabil, yang di ukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atau hutang-hutangnya dengan tepat waktu, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Salah satu pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Secara umum, ratio keuangan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena “urat nadi” suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.

b. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi.

c. Rasio Solvabilitas (*Solvency Ratio*)

Menurut pendapat Bambang Riyanto (2013) pengertian solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya jika sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasikan.

d. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Menurut Harahap (2010), rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.

3. Fungsi dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Fungsi pengukuran kinerja keuangan cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Ada beberapa fungsi dari laporan keuangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Optimalisasi keuangan

Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas. Termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan, atau penggunaan keuangan yang tidak efisien.

b. Efektifitas manajemen operasional

Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya, dan efektifitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Dengan kata lain melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional.

d. Optimalisasi penggunaan aktiva

Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besaran aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan.

d. Tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan

Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang

e. Untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang

Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan memerlukan analisa, keuangan yang lebih seksama, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Manfaat analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2014:109) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Analisis rasio keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk pembuatan perencanaan.
- c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
- d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak

stakeholder organisasi.

2.6.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Secara konvensional, frasa “kewajiban jangka pendek” mengarah pada kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau dalam satu periode siklus pembelian-produksi-penjualan-penagihan (Subramanyam & Wild, 2010). Pengguna rasio ini kerap kali berasal dari kalangan kreditur jangka pendek, seperti bankir, untuk memberikan keputusan pemberian pinjaman. Dalam perhitungannya, rasio ini menggunakan komponen kas atau aset lancar lainnya sebagai pembilang dan kewajiban lancar sebagai penyebut. Namun, komponen pembilang yang digunakan dapat berbeda-beda antar rasio karena disesuaikan dengan kepentingan yang bersangkutan. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai rasio likuiditas di antaranya rasio lancar dan rasio cepat.

Rasio lancar atau *current ratio* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dapat terealisasi menjadi kas dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Komponen pembilang dalam perhitungan rasio lancar terdiri atas kas dan setara kas, efek yang dapat diperjualbelikan, piutang usaha, persediaan, serta beban dibayar di muka. Sayangnya, keterlibatan komponen persediaan dalam perhitungan rasio lancar menjadi salah satu faktor yang mengurangi keakuratan rasio yang bersangkutan.

Hal tersebut dikarenakan persediaan sering kali merupakan bagian dari aset lancar yang paling tidak likuid dan memiliki nilai buku yang paling tidak andal (Ross *et al.*, 2015). Oleh karena untuk mengevaluasi penilaian likuiditas perusahaan, maka perhitungan rasio cepat atau *quick ratio* mengeluarkan

komponen persediaan dalam perhitungannya. Tidak hanya itu, beban dibayar di muka pun juga dikeluarkan dari perhitungan ini dengan alasan bahwa komponen tersebut tidak memungkinkan untuk dijual kembali oleh perusahaan. Sehingga dengan tujuan yang sama, rasio cepat dapat menguji likuiditas perusahaan secara lebih akurat. Meski begitu, penggunaan rasio cepat perlu melihat industri bisnis dari perusahaan yang bersangkutan, karena beberapa perusahaan memungkinkan untuk memiliki persediaan yang lebih cepat untuk dikonversi atau diubah menjadi kas dibandingkan komponen aset lancar lainnya, sebagai contoh perusahaan restoran cepat saji. Sehingga pada kasus perusahaan yang demikian, rasio lancar akan dirasa lebih tepat dipakaidibandingkan rasio cepat.

Dari hasil perhitungan rasio likuiditas, baik rasio lancar maupun rasio cepat, apabila perusahaan memiliki nilai yang tinggi, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai yang rendah, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak likuid dan dapat diindikasikan tidak mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Saat kondisi perusahaan tidak likuid, penjualan paksa atas aset-aset yang masih digunakan dapat saja dilakukan atau bahkan lebih parahnya dapat memaksa pemilik perusahaan dengan kewajiban tak terbatas untuk menjual aset pribadinya (Subramanyam & Wild, 2010).

Meski terdapat beberapa anggapan bahwa perusahaan dapat dikatakan memiliki likuiditas yang baik saat hasil perhitungannya menunjukkan 200% atau 2:1, namun menurut Hery (2015b) tidak ada standar likuiditas mutlak yang dapat diterapkan. Didukung juga oleh pernyataan Ross *et al.* (2015) bahwa rasio likuiditas yang tinggi tidak sepenuhnya baik karena hal tersebut juga memungkinkan adanya kelebihan kas secara berlimpah dan tidak terpakai (*idle*

cash) pada perusahaan.

2.6.2 Rasio Solvabilitas

Selanjutnya yakni rasio solvabilitas yang juga digunakan untuk keperluan analisis kredit layaknya rasio likuiditas, namun yang membedakan keduanya yakni dimensi waktu yang digunakan. Rasio solvabilitas atau yang disebut juga rasio *leverage* merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perhitungan rasio solvabilitas dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan neraca, pendekatan laporan laba rugi, serta pendekatan laporan laba rugi dan neraca. Rasio liabilitas terhadap aset dan rasio liabilitas terhadap ekuitas merupakan beberapa contoh rasio solvabilitas yang menggunakan pendekatan neraca. Maka dari itu, perhitungan keduanya melibatkan komponen-komponen pada laporan posisi keuangan sebagai pembilang dan penyebutnya.

Rasio liabilitas terhadap aset atau *debt-to-asset ratio* diukur dengan menggunakan perbandingan total liabilitas dan total aset. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh liabilitas terhadap pengelolaan aset atau seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan didanai oleh liabilitas yang dimiliki. Apabila hasil dari perhitungan rasio liabilitas terhadap aset tinggi, maka kemungkinan perusahaan mendapatkan tambahan dana dari kreditur adalah kecil. Hal tersebut dikarenakan rasio liabilitas terhadap aset yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyaknya total aset milik perusahaan yang didanai oleh liabilitas, sehingga adanya kemungkinan kondisi perusahaan mengalami gagal bayar.

Sedangkan, rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *debt-to-equity ratio* digunakan untuk menunjukkan hubungan antara modal yang berasal dari eksternal

perusahaan, misalnya berupa utang jangka panjang, dengan modal yang berasal dari internal perusahaan, misalnya berupa laba ditahan. Dengan kata lain, rasio liabilitasterhadap ekuitas tersebut menunjukkan setiap rupiah dari modal internal yang dijadikan sebagai agunan modal eksternal. Sama halnya dengan rasio liabilitas terhadap aset, bagi penyokong modal eksternal atau kreditur akan lebih merasa aman apabila memberikan kredit bagi perusahaan dengan hasil perhitungan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang rendah.

Dengan begitu, apabila perusahaan yang bersangkutan mengalami kegagalan keuangan, maka masih terdapat modal internal perusahaan yang dapat dijadikan sebagai agunankredit. Lain halnya dengan uraian-uraian di atas, menurut Hery (2015), hasil perhitungan rasio solvabilitas yang tinggi tidak berarti mutlak bahwa kondisi perusahaan sedang buruk. Karena apabila perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan kredit yang diterima dengan baik, misal membeli aset atau melakukan eskpansi usaha, maka yang tercipta bukanlah gagal bayar melainkan justru peluang besar bagi perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan hasil usaha dan labanya. Namun sayangnya, perkiraan keuangan jangka panjang yang menjadi dasar pada rasio solvabilitas dianggap kurang dapat diandalkan, sehingga membuat rasio solvabilitas menggunakan tindakan analisis yang kurang akurat dibandingkan rasio likuditas (Subramanyam & Wild, 2010).

2.6.3 Rasio Profitabilitas

Berbeda dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, rasio pofitabilitas bukan lagi rasio yang digunakan untuk keperluan analisis kredit. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai derajat kesuksesan atau kegagalan perusahaan, secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, dalam memanfaatkan dan mengoperasikan asetnya untuk menghasilkan laba. Sehingga, laba yang dihasilkan perusahaan tidak diukur berdasarkan besarnya secara

mutlak, karena laba yang besar belum tentu menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik pula. Rasio ini pun cukup menjadi sorotan bagi perusahaan karena setiap keputusan yang dibuatkan merujuk pada usaha peningkatan dan pengoptimalan laba.

Beberapa rasio yang digunakan dalam menilai rasio profitabilitas di antaranya margin laba bersih (*net profit margin*), rasio imbal hasil rata-rata aset (*return on total asset*). Pada dasarnya, rasio margin laba kotor memiliki kesamaan

dengan rasio margin laba bersih. Keduanya menggunakan penjualan bersih sebagai komponen penyebut, hanya saja perbedaan komponen pembilang dalam perhitungan keduanya yang menjadikan kegunaannya pun berbeda pula. Baik rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase komponen pembilang atas penjualan bersih, yang mana komponen pembilang pada rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih masing-masing adalah laba kotor dan laba bersih itu sendiri.

Komponen penjualan bersih didapatkan dari hasil pengurangan penjualan tunai maupun kredit dengan retur dan potongan penjualan. Sedangkan, komponen laba kotor dan laba bersih masing-masing didapatkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dan laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan. Sama halnya dengan rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih, rasio imbal hasil rata-rata aset dan rasio imbal hasil rata-rata ekuitas juga memiliki kesamaan, namun terletak pada komponen pembilang. Sedangkan komponen penyebutnya justru berbeda. Keduanya menggunakan laba bersih sebagai komponen pembilang serta total aset dan total ekuitas sebagai komponen penyebut pada masing-masing perhitungannya.

Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik aset maupun ekuitas, untuk menghasilkan keuntungan atau laba bersih. Menurut Subramanyam & Wild (2010), penggabungan komponen laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada perhitungan rasio imbal hasil menjadikan rasio tersebut lebih bersifat menyeluruh dan unggul dibandingkan rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas.

Menurut IASB (2016), sehubungan dengan penerapan standar akuntansi sewaterbaru, tidak keseluruhan rasio keuangan terkena dampaknya. Beberapa rasio akan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, sedangkan beberapa lainnya bisa saja terkena dampak namun tidak signifikan atau bahkan tidak berubah. Kapitalisasi yang menyebabkan kenaikan nilai liabilitas sewa memungkinkan penurunan pada rasio lancar dan kenaikan pada rasio liabilitas terhadap ekuitas. Kerangka Pikiran

Kinerja keuangan merupakan gambaran kinerja perusahaan pada periode tertentu didasarkan pada rasio keuangan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas berupa *current ratio*, rasio solvabilitas berupa *debt to equity ratio*, dan rasio profitabilitas berupa *net profit margin*, *return on asset*. Adanya penerapan standar baru di Indonesia mengakibatkan dampak pada beberapa sektor termasuk sektor telekomunikasi. Standar baru yang akan diterapkan tersebut salah satunya adalah PSAK 72 yang mengatur tentang pendapatan kontrak dari pelanggan. Sebelumnya, pendapatan diatur dalam PSAK 23, namun setelah adanya penerapan PSAK 72 menyebabkan perbedaan pengakuan, penyajian, pelaporan dan pengungkapan pada pendapatan suatu entitas.

Perbedaan standar tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada kinerja keuangan suatu entitas. Hal ini dikarenakan pendapatan yang

dilaporkan di laporan laba rugi nantinya akan berhubungan dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan laba ditahan laporan posisi keuangan, laporan arus kas hingga pengungkapan yang ada di catatan atas laporan keuangan.

Pertama, pendapatan yang dihasilkan dari kontrak dengan pelanggan yang belum dilakukan akan menimbulkan pengakuan terhadap kewajiban sehingga semakin besar kontrak yang belum diselesaikan akan meningkatkan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi maka dengan adanya penerapan PSAK 72 ini bisa berdampak pada tingkat likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan.

Di sisi lain, semakin besar tingkat likuiditas suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Jika banyak kontrak yang belum selesai maka semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tingkat likuiditas suatu perusahaan akan semakin kecil yang menandakan bahwa perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajiban lancarnya dengan aset yang dimiliki.

Kedua, pendapatan yang diakui di laporan laba rugi nantinya akan diakui di bagian modal pada laporan posisi keuangan. Semakin besar pendapatan yang diakui karena sudah selesainya kewajiban akan menurunkan rasio solvabilitas sehingga perusahaan dianggap mampu untuk mengelola kegiatannya dengan penggunaan modal yang lebih besar dari hutang.

Ketiga, dari adanya pengakuan pendapatan yang timbul karena berkurangnya kewajiban, maka akan meningkatkan pencapaian laba bersih satu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga bisa memberikan manfaat kepada *stakeholders*. Dengan adanya penambahan standar yang mengatur tentang pendapatan tersebut, maka hal ini akan berdampak pada pencapaian kinerja

keuangan suatu perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 72. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dampak pada kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI.

2.7 Perbedaan PSAK 23 dan PSAK 72

Berikut adalah perbedaan antara PSAK 23 dan PSAK 24:

Table 2.1
Perbedaan PSAK 23 dan PSAK 72

Keterangan	PSAK 23	PSAK 72
Pengakuan pendapatan	Mengakui pendapatan saat kemungkinan besar manfaat ekonomik di masa mendatang akan mengalir ke perusahaan dan diukur secara andal. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi maupun belum selesai proses transaksi	Pendapatan diakui oleh perusahaan ketika perusahaan telah melaksanakan kewajiban dengan mengalihkan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan (aset). Pelanggan akan mendapatkan pengendalian atas aset ketika aset telah dialihkan. Pendapatan diakui saat transaksi telah terjadi
Pengukuran pendapatan	Pendapatan dapat diukur menggunakan nilai wajar imbalan atau yang dapat diterima dikurangi dengan potongan dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan.	Pendapatan diakui sejumlah harga transaksi (tidak termasuk estimasi imbalan variabel yang dibatasi) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

<p>Pengukuran pendapatan</p>	<p>Pendapatan dapat diukur menggunakan nilai wajar imbalan atau yang dapat diterima dikurangi dengan potongan dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan.</p> <p>Jumlah kategori yang signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan berikut ini: Penjualan barang Penjualan jasa Bunga Royalty Dividen, dan Pendapatan dari pertukaran barang atau jasa setiap kategori signifikan dari pendapatan.</p>	<p>Perusahaan menyatakan bahwa informasi yang cukup diharapkan bagi pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan Bank timbul dari kontrak dengan pelanggan.</p> <p>Perusahaan memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai sebagai berikut: Kontrak dengan pelanggan Pertimbangan signifikan dan perubahan pertambahan dalam menerapkan</p>
------------------------------	--	---

		<p>Pernyataan terhadap pelanggan Pengakuan aset dari biaya untuk mendapatkan dan memenuhi kontrak dengan pelanggan</p>
<p>Biaya yang diakui ketika pengakuan pendapatan</p>	<p>Bunga diakui dengan metode sukubunga efektif seperti yang telah Dijelaskan pada PSAK 55: <i>Instrumen Keuangan</i>: Pengakuan dan Pengukuran.</p> <p>Royalti diakui menggunakan dasar akrual dengan substansi perjanjian yang relevan.</p> <p>Dividen diakui ketika hak pemegang saham saat menerima pembayaran yang telah ditetapkan.</p>	<p>Perusahaan mengakui aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak jika biaya yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut: Biaya yang berkaitan langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi dengan spesifik oleh perusahaan. Biaya yang menghasilkan sumber daya perusahaan dapat digunakan dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa mendatang.</p>

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/Tahun/Judul	Variabel yang diteliti	Hasil
1	Veronica, et al/2019/ dampak penerapan pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan real estate	X :Pengakuan pendapatan X2 : psak 72 Y :Kinerja keuangan	penerapan pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jikadibandingkan dengan saat menggunakan standar sebelumnya.
2	Mazumder & Purohit/ 2018/ pengakuan pendapatan atas kontrak jangka panjangberdasarkan IFRS 15 dengan studi kasus pada perusahaan real estate di Bangladesh	X: Pengakuan pendapatan Y :IFRS 15	Perusahaan ini laporkan berkomitmen untuk mengadopsi standar tersebut dan melakukan beberapa persiapan untuk implementasistandar tersebut

3	<p>Haifa Shabirah HS / 2018</p> <p>/ Pengaruh Penerapan PSAK 72 terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ 45 Tahun 2018)</p>	<p>Variabel dependen : Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Independen : PSAK 72 diukur menggunakan variabel Dummy</p> <p>Variabel kontrol : Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas</p>	<p>penerapan PSAK 72 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan padaperusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2018.</p> <p>sesuai dengan teori sinyal bahwa perusahaan yang telah menerapkan PSAK 72 secara dini dapat dijadikan sinyal positif oleh manajemen perusahaan kepada investor untuk memberikan gambaran bahwa perusahaan sudah mengikuti kebijakan akuntansi dan pendapatan yang diakui telah mencerminkan nilai perusahaan secara tepat</p>
4	<p>Veronica, Grosu, Marian, Socoliuc, <i>Effects and Implications of the Implementation of IFRS 15 - Revenue From Contracts With Customers</i></p>	<p>Variabel Independent: Pendapatan</p> <p>Variabel Dependent: IFRS 15</p>	<p><i>Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mencapai kemajuan yang cukup berarti dalam proyek besar.</i></p>

5	<p>Veronica, Utami Puji Lestari , Elisabeth Yansye Metekohy/2018/Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018</p>	<p>X: Pengakuan Pendapatan X2 : PSAK 72</p> <p>Y; Kinerja Keuangan</p>	<p>penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan standar sebelumnya. Pengaturan pada PSAK 72 membuat pendapatan dari kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tidak dapat diakui pada tahun 2018. Oleh karena itu, nilai pendapatan tahun 2018 pada masing- masing perusahaan menjadi lebih kecil jika dibanding nilai pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 44.</p>
6	<p>Mia Maysita Aghogho 1 Linjte Kalangi 2 Wulan D. Kindangen, 2020 “Evaluasi penerapan PSAK 72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bitung Cemerlang”</p>	<p>Variabel Independent : pengukuran, Pengakuan Pendapatan, PSAK 72 Variabel dependent: Laporan keuangan,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bitung Cemerlang dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.72 karena perusahaan belum sepenuhnya menerapkan 5 model langkah dalam mengakui dan mengukur pendapatan</p>
7	<p>Issa, Jamila, Analisis Pengakuan Pendapatan pada Penjualan Apartemen di PT XYZ</p>	<p>Variabel independent : pengakuan pendapatan, PSAK 44, PSAK 72</p> <p>Variable dependent: penjualan</p>	<p>Pada tahun 2018 mengalami kerugian karena pembayaran penjualan dari konsumen atau pelanggan belum mencapai 20%. Progress konstruksi bangunan per 30 November 2019 telah mencapai 41,78% dan mendapatkan laba yang tercatat pada laporan keuangan.</p>

8	A. Londa, H. Manossoh, S. Mintalangi, Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT. POS Indonesia (PERSERO) Manado	Variabel Independent : pengakuan, pendapatan, PSAK 72 Variabel Dependent: laporan keuangan	Pengakuan Pendapatan pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado belum sesuai dengan PSAK 72
9	Marco Tutino, Carlo Regoliosi, Giorgia Mattei, Niccolò Paoloni and Marco Pompili, <i>Does the IFRS 15 impact earnings management? Initial evidence from Italian listed companies</i>	Variabel independent : IFRS 15, utilities Variabel dependent: manajemen laba	Dimana manajemen laba industri memiliki pengaruh yang tinggi, memberikan pilihan untuk meramalkan pergerakan hipotetis manajer dalam penerapan IFRS 15.
10	M. Azwan, Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur	Variabel Independent: akuntansi pendapatan, PSAK 72 Variabel dependent : laporan keuangan	Melakukan pencatatan dan pengakuan yang sesuai PSAK 23 dengan metode accrual basis, namun PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur masih belum melakukan pengakuan pada PSAK 72
11	Wiliana Agustrianti et al (2020) (Agustrianti, Saputri Mashuri, & Nopiyanti, 2020) "Dampak penerapan psak 72 terhadap kinerja Keuangan perusahaan <i>property, real estate and Building construction</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2019	X : PSAK 72 Y : Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan

12	Ila Casnila at al (NURFITRIANA,2020)“Analisis dampak kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan psak 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei)	X : PSAK 72 Y ; Kinerja keuangan	Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dampak <i>current ratio</i> sebelum dan sesudah penerapan PSAK72.Sedangkan tidak terdapat perbedaan dampak <i>debt to equityratio</i> dan <i>netprofitmargin</i> sebelum dan sesudah penerapan PSAK72 pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI.
13	Duwi rahayu atal (2020) Dampak Implementasi Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan Di Era Pandemi Covid-19	X ; PSAK 72 Y : Kinerja keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: PSAK 72 memiliki pengaruh signifikan (negatif) terhadap rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio pasar dan rasio profitabilitas. Sebaliknya implementasi PSAK 72 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas.
14	Claristy Novenaliane Halim PENGARUH IMPLEMENTASI PENGAKUAN PENDAPATAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate Tahun 2018-2019)	X ; Pengakuan pendapatan Y : Kinerja Keuangan	a. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang tercermin oleh rasio likuiditas menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini terjadi karena nilai kas perusahaan yang berasal dari pendapatan dari kontrak pelanggan jangka panjang harus diakui secara bertahap atau dalam satu titik, sehingga pengakuan pendapatan di awal mengalami penurunan b. Hasil berbeda dengan rasio kinerja keuangan lainnya bahwa rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil rasio aktivitas menunjukkan perusahaan real estate mengalami sedikit penurunan dalam

			<p>mengefisiensikan aset-asetnya diakibatkan masih banyak kontrak jangka panjang yang belum selesai hingga akhir tahun 2019 Hasil rasio solvabilitas menunjukkan sedikit peningkatan karena aset dinilai kecil. Hasil rasio profitabilitas menunjukkan sedikit peningkatan sebab penerapan PSAK 72 dinilai lebih transparansi dan jelas dengan adanya lima tahapan PSAK 72. Hasil rasio pasar mengalami sedikit penurunan karena pengakuan pendapatan berkurang akibat pengakuan pendapatan dapat berfluktuatif karena pasarah bahwa nilai pendapatan akan dihitung sesuai kontrak, sehingga mengurangi resiko dan menambah informasi pada shareholder.</p>
15	<p>Hana Rolanda Rizal, Titi Suhartati, Yenny Nuraeni, Dampak Pengakuan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Diterapkan PSAK 72 Dalam Laporan Keuangan PT. X</p>	<p>Variabel Independent : Pengakuan pendapatan. PSAK 72 Variabel dependent : laporan keuangan</p>	<p>Adanya pencatatan yang cukup tinggi pada akun pendapatan sehingga mengakibatkan berdampak pada <i>income statement</i></p>
16	<p>Christian Stadler, <i>the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers</i></p>	<p>Variabel Independent: pengakuan pendapatan, IFRS 15 Variabel dependent: pelaporan keuangan</p>	<p>informasi memiliki tingkat lebih rendah meskipun di luar beberapa industri IFRS 15 memiliki dampak yang relatif kecil pada pengakuan dan pengukuran pendapatan.</p>

17	Lecturer Ph.D. Cristina Aurora BUNEA-BONTAŞ, <i>Accounting For Discounts Under IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers</i>	Variabel independent: IFRS 15, pendapatan Variabel dependent: laporan keuangan	Ketentuan baru IFRS 15 berdampak pada semua entitas, tetapi tingkat dampaknya dapat bervariasi secara signifikan
18	Amr M. Khamis, <i>Perception of Preparers and Auditors on New Revenue Recognition Standard (IFRS 15): Evidence From Egypt</i>	Variabel independent: Pengakuan pendapatan, Variabel dependent: IFRS 15	Standar baru akan berdampak signifikan pada seluruh entitas, mengakibatkan perubahan dalam bagaimana dan kapan pendapatan diakui, dan akan membutuhkan adopsi sistem

Sumber : Penelitian terdahulu

2.9 Hubungan Antar Variabel

Pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan PSAK 72. PSAK 72 mengubah standar sebelumnya yaitu PSAK 34 (kontrak konstruksi), PSAK 23 (pendapatan) dan IAS 18, ISAK 10 (program loyalitas pelanggan), ISAK 21 (perjanjian konstruksi real estate), ISAK 27 (pengalihan aset dari pelanggan), PSAK 44 (akuntansi aktivitas pengembangan real estate), BAS 7 (perlakuan akuntansi dan keterbukaan dalam transaksi hubungan keagenan). PSAK 72 ini diadopsi atas IFRS 15. PSAK 72 mulai digunakan tanggal 1 Januari 2020 tetapi DSAK memperbolehkan penerapan sejak dini. PSAK 72 menggantikan sistem pendapatan kontrak berawal dari (rule based) menjadi (principle based). PSAK 72 merupakan wadah dari pengakuan pendapatan.

Perubahan ini berdampak signifikan namun ada peralihan dalam pengungkapan kebijakan akuntansi berakibat atas pengakuan pendapatan maka berpengaruh kepada laba rugi periode lalu (sekarang serta masa depan) serta perkembangan bisnis melangsungkan pergantian pada prasyarat kontrak selama melengkapi keterangan kontrak serta ketentuan penyempurnaan kewajiban

berdasarkan PSAK 72. Maksud dari penerapan ini yaitu untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dari sifat, waktu serta ketidakyakinan pada pendapatan serta arus kas yang muncul dari kontrak dengan pelanggan.

Pada PSAK72 untuk mengungkapkan pendapatan perlu adanya uraian transaksi sesuai dengan lima tahapan kontrak yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, serta mengakui pendapatan ketika (pada saat) perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Standar ini adanya pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian sehingga dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan sudut pandang sifat, waktu serta ketidakyakinan dalam pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dengan adanya standar ini perusahaan mengakui pendapatan untuk memperlihatkan pengalihan barang ataupun jasa yang dijanjikan pada pelanggan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas pada pertukaran dengan barang maupun jasa tersebut.

PSAK72 mengubah PSAK 23, standar ini berlaku ke semua industri menimbulkan kekhawatiran kesiapan industri karena tidak semua industri memiliki transaksi sederhana yang dengan mudah menerapkan lima tahapan. Pada PSAK 44 untuk industri real estate tidak bisa mengakui pendapatan dari aktivitas konstruksi properti sampai properti tersebut diserahkan kepada pembeli sedangkan pada PSAK72 berlaku sebaliknya.

2.10 Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan merupakan gambaran kinerja perusahaan pada periode tertentu didasarkan pada rasio keuangan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas berupa *current ratio*, rasio solvabilitas berupa *debt to equity ratio*, dan rasio profitabilitas berupa

net profit margin.

Adanya penerapan standar baru di Indonesia mengakibatkan dampak pada beberapa sektor termasuk sektor telekomunikasi. Standar baru yang akan diterapkan tersebut salah satunya adalah PSAK 72 yang mengatur tentang pendapatan kontrak dari pelanggan.

Perbedaan standar tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada kinerja keuangan suatu entitas. Hal ini dikarenakan pendapatan yang dilaporkan di laporan laba rugi nantinya akan berhubungan dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan laba ditahan laporan posisi keuangan ,laporan arus kas hingga pengungkapan yang ada di catatan atas laporan keuangan.

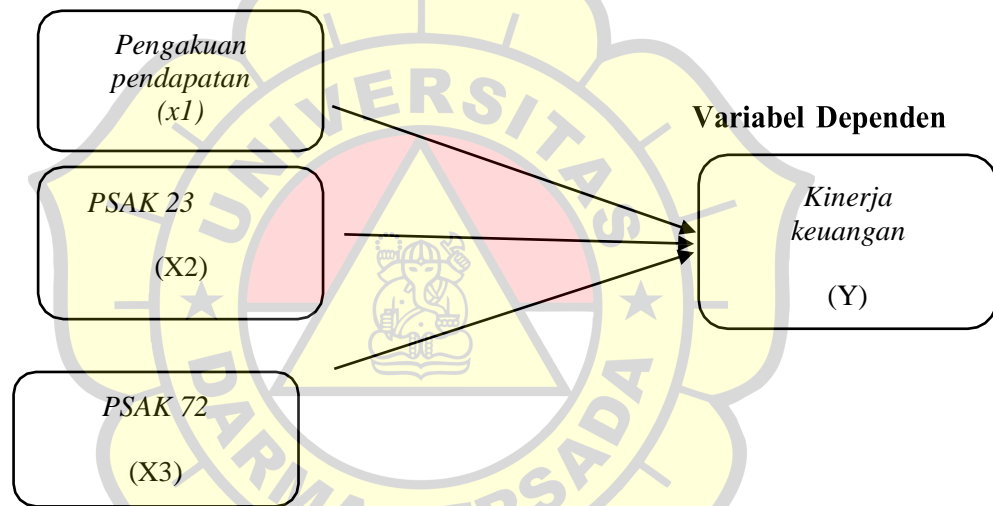
Penerapan PSAK 72 di masa Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi para pelaku usaha, salah satunya adalah perusahaan telekomunikasi. Tentu saja dampak yang sangat dikhawatirkan adalah laporan keuangan 2020, hal itu diakibatkan oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19. Perlambatan ekonomi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaantelekomunikasi yakni pada saat pengakuan pendapatan kontrak dari pelanggan harus melakukan penyusunan strategi dengan mengelompokkan penjualan yang mana yang dapat diakui dan dicatat dengan cepat, kemudiantantangan selanjutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut diakibatkan masyarakat yang cenderung menyimpan uangnya untuk keperluan bahan makanan untuk menghadapi pandemi covid-19.

Pendapatan diakui untuk dapat menggambarkan penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan yang merefleksikan pembayaran yang diharapkan akan diperoleh oleh entitas atas barang atau jasa tersebut. Setiap menentukan pendekatan pengakuan pendapatan padaPSAK 72, entitas harus melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari lima tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
3. Menentukan harga transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Gambar 2.3 Kerangka Konsep

Variabel Independen



Keterangan:

X1 : *Pengakuan Pendapatan*

X2 : *PSAK 23*

X3 : *PSAK 72*

Y : *Kinerka Keuangan*

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021)